



ESTIMASI MANFAAT PASTI DALAM AKUNTANSI IMBALAN KERJA

Dituturkan Jan Hoesada, Anggota KSAP.

PENDAHULUAN

Pemerintah NKRI menimbang-nimbang kemungkinan menerapkan akuntansi imbalan kerja. Terdapat dua hampiran akuntansi imbalan kerja, yaitu manfaat pasti dan iuran pasti. Terdapat arus global pelaku akuntansi untuk meninggalkan hampiran manfaat pasti, dan dunia akuntansi kini di dominasi oleh akuntansi iuran pasti. Makalah diadakan disajikan sebagai peramai rapat KSAP dengan Komite Konsultatif tanggal 16 Juni 2021.

KERUMITAN ESTIMASI LIABILITAS PENSIUN

Troy Adkins , 2020, pada makalah berjudul *The Rise, Fall, and Complexities of the Defined-Benefit Plan*, menjelaskan antara lain berbagai hal sebagai berikut. *Defined Benefit Plan* (DBP) atau paket manfaat pasti adalah pembayaran pasti dan terjamin kepada para pensiunan, di danai pemberi kerja, yang juga bertugas memilih hampiran investasi. Pada sektor privat, DBP sebagian besar telah diganti oleh *Defined Contribution Plan* (DCP) atau paket iuran pasti , karena pihak entitas pemberi-kerja memandang DCP lebih efektif-biaya dan lebih sederhana . Estimasi liabilitas sebuah paket-pensiun adalah rumit dan berisiko keliru. Pada hampiran DBP, pemberi-kerja bertanggung-jawab akan pengambilan keputusan investasi dan menanggung risiko terkait fluktuasi pasar. Pada DCP , tanggung-jawab tersebut pindah kepada karyawan. Perubahan tersebut menyebabkan pemberi kerja menghemat sejumlah cukup signifikan, pemberi kerja dibebaskan dari kesukaran/kerumitan mengestimasi liabilitas DBP dan kesulitan menganggarkan belanja imbalan-paska-kerja. Pemrovisian DBP di-luar neraca menuai isu rekayasa LK dan mendistorsi kondisi keuangan entitas. Kerumitan terkait pada paket-investasi-aset membutuhkan pengetahuan/kemampuan berinvestasi , membutuhkan bantuan berbagai pakar seperti lembaga investasi, lembaga aktuarial dan akuntan publik. Jumlah aset dan liabilitas terkait DBP amat besar, sehingga membutuhkan banyak waktu dan pemikiran direksi.

Kerumitan estimasi kewajiban pensiun adalah sebagai berikut.

Pertama, kerumitan membuat *projected benefit obligation* (PBO), berupa nilai-kini liabilitas-yang-akan-datang imbalan-kerja SDM.

Imbalan manfaat pasti misalnya adalah sebuah manfaat-tahunan-pensiun setara 2 % gaji dikali-kan jumlah tahun kerja pada pemberi-kerja tersebut. Bila seseorang bekerja selama 45 tahun pada sebuah entitas dan menerima gaji pertama 25.000 dengan 2% pertumbuhan imbalan pertahun selama masa-kerja di entitas LK tersebut maka imbalan pensiun tahunan adalah 1.219 (dihitung dari $25,000 \times 1.02^{45} \times .02$) diterima pensiunan sepanjang misalnya 30 tahun sisa-hidup. Bila tarif bunga SUN berjangka 30 tahun adalah 4% digunakan sebagai faktor-diskonto , maka imbalan-kerja-tahunan sepanjang 30 tahun masa-pensiun sebesar 21.079. Nilai kini imbalan-kerja berbasis diskonto 4% atau PBO adalah 3.753 ter-danai-penuh (fully funded) oleh entitas-pemberi kerja dari sudut-pandang aktuarial.

Kedua, untuk estimasi PBO, dibutuhkan 10 asumsi aktuarial tambahan sebagai berikut.

BERBAGAI ASUMSI DBP	PERTIMBANGAN	DAMPAK PADA PBO
1. Formula imbalan berhenti kerja.	Formula imbalan berhenti-kerja berubah tiap saat.	Setiap perubahan jenis imbalan akan berdampak material pada PBO estimasian.
2. Estimasi pertumbuhan gaji tahunan.	Pertumbuhan gaji di masa yad tak mungkin di proyeksikan secara tepat.	Tingkat pertumbuhan gaji tahunan yang lebih besar akan meningkatkan PBO.

3. Estimasi panjang karir.	Adalah mustahil mengetahui berapa lama seorang karyawan bekerja pada sebuah organisasi.	Makin panjang tahun-lama-kerja, makin besar PBO.
4. Tahun-tahun kerja yang digunakan untuk menghitung PBO.	Pedoman aktuarial mewajibkan bahwa PBO mempertimbangkan estimasi-kenaikan-gaji-yad, namun mengabaikan potensi-pengabdian-karyawan di masa yad.	Bila pedoman aktuarial mewajibkan memperhitungkan potensi-pengabdian yad, maka PBO estimasian meningkat luar-biasa.
5. Ketidak pastian perolehan hak pensiun. (<i>Vesting uncertainties</i>)	Adalah tak mungkin mengetahui apakah karyawan akan bekerja cukup-panjang pada pemberi-kerja, sedemikian rupa, sehingga berhak atas imbalan berhenti-kerja.	Provisi hak-atas-imbalan-pensiun akan meningkatkan ketidak-pastian estimasi PBO (<i>Vesting provisions will increase the uncertainty in the estimate of the PBO</i>).
6. Ketidak pastian panjang-waktu mantan-karyawan menikmati imbalan-paska-kerja-bulanan.	Adalah tak-mungkin mengetahui berapa panjang pensiunan akan hidup.	Makin panjang hidup pensiunan, makin lama ia menerima imbalan-pemberhentian-kerja, makin besar dampaknya pada estimasi PBO.
7. Asumsi pembayaran-pemberhentian-kerja.	Sulit mengetahui jenis imbalan yang dipilih karyawan, karena status pewaris berubah sepanjang waktu.	Pengangkatan pewaris imbalan-paskakerja berpengaruh pada berapa panjang imbalan tersebut harus di bayar, berpengaruh pada estimasi PBO.
8. Provisi perubahan biaya-hidup. (<i>Cost-of-living adjustment (COLA) provisions</i>)	Adalah sulit memperkirakan jenis/ragam kebutuhan-hidup-sehari hari di masa depan.	Tambahan imbalan berbasis jenis-kebutuhan akan meningkatkan estimasi PBO.
9. Tarif diskonto digunakan untuk berbagai jenis imbalan sepanjang periode estimasi, sampai tanggal pensiun.	Adalah tak-mungkin untuk mengetahui tarif-diskonto yang harus-digunakan secara tepat untuk menghitung nilai-kini saat pensiun.	Makin tinggi asumsi tarif diskonto, makin rendah estimasi PBO, demikian sebaliknya. Manipulasi asumsi tarif diskonto bertujuan manipulasi PBO.
10. Tarif diskonto digunakan untuk nilai anuitas imbalan-kerja pada tanggal PHK sampai tanggal LK terakhir.	Adalah tak-mungkin mengetahui tarif-diskonto yang layak-pakai untuk menghitung nilai-kini imbalan-kerja hari-ini.	Makin tinggi asumsi tarif-diskonto, makin rendah estimasi PBO. Manajemen berpeluang merekayasa estimasi PBO cq liabilitas-neto di Laporan Neraca.

Ketiga, sekadar informasi, FASB 87 mengizinkan akuntansi-luar-neraca untuk jumlah aset dan liabilitas, baik pada hampiran DBP maupun DCP.

Keempat, bagi penulis, manajemen arus kas di atas segalanya. Entitas LK Pemerintahan sebaiknya membuat proyeksi keuangan cq proyeksi LK lima tahunan, agar jangan sampai terjadi krisis keuangan karena ledakan kewajiban pembayaran dana-pensiun suatu tahun tertentu. Penganggaran liabilitas DBP karena kerumitan manajemen investasi, berbagai perhitungan yang membutuhkan perangkat-lunak berbasis AI, pendampingan jasa-akhli seperti konsultan investasi, aktuaris dan akuntan publik pakar akuntansi imbalan-kerja. Ukuran aset dan kewajiban DBP amat besar, relatif terhadap *total assets* membutuhkan SDM akuntansi nan-piawai. Pada APBN negara-negara maju, misalnya AS dan Inggris, sekitar 50% atau lebih APBN untuk belanja pegawai, jaminan-sosial, pensiun, dan kesehatan-nasional. Hampir sepertiga APBN untuk belanja kesehatan-nasional, sekitar seperlima APBN untuk belanja kesejahteraan-sosial, sekitar seperempat APBN adalah untuk belanja/pembayaran pensiun. Ekuitas negatif dihindari FASB 87, ekuitas negatif bagi LK ter-terpa imbalan kerja sebuah bangsa adalah biasa. Bagi NKRI, data-base PT Taspen rasanya telah siap mendukung akuntansi imbalan kerja pemerintahan.

Jakarta, 15 Juni 2021.